

TUGAS AKHIR

EVALUASI PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DISTRIK NABIRE KOTA

YOHANA MARICE RUMBIK

8160302251099



MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *“Evaluasi Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima di Distrik Nabire Kota”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Satpol PP dalam penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan PKL terhadap Peraturan Daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima di Distrik Nabire Kota yang dipilih secara purposive sesuai dengan keterlibatan mereka dalam fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satpol PP dalam penanganan PKL telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, serta penertiban di lapangan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta koordinasi lintas instansi yang belum maksimal. Selain itu, faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah, faktor ekonomi PKL, serta belum tersedianya lokasi relokasi yang strategis turut mempengaruhi efektivitas penanganan PKL.

Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan PKL meliputi sosialisasi Peraturan Daerah, pembinaan, peringatan bertahap, penertiban secara humanis, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun, upaya tersebut masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif, khususnya dalam penyediaan lokasi usaha yang layak bagi PKL.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan PKL di Distrik Nabire Kota tidak hanya bergantung pada peran Satpol PP, tetapi juga membutuhkan sinergi antarinstansi serta kebijakan pemerintah daerah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kata kunci: Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Efektivitas, Peraturan Daerah

ABSTRACT

This thesis is entitled “*Evaluation of the Role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Handling Street Vendors in Nabire City District*”. This study aims to analyze the role of Satpol PP in handling street vendors, identify the factors affecting the effectiveness of its implementation, and evaluate the efforts made to improve street vendors’ compliance with regional regulations.

This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The informants in this study consisted of Satpol PP officers and street vendors in Nabire City District, selected purposively based on their involvement in the research focus.

The results show that the role of Satpol PP in handling street vendors has been implemented through socialization activities, guidance, supervision, and field enforcement. However, its effectiveness is still not optimal. This is due to internal factors such as limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, budget constraints, and less optimal inter-agency coordination. In addition, external factors such as low public awareness of regional regulations, the economic conditions of street vendors, and the lack of strategic relocation sites also influence the effectiveness of street vendor management.

The efforts made by Satpol PP to improve compliance include socialization of regional regulations, guidance, gradual warnings, humane enforcement, and coordination with local government. However, these efforts still require more comprehensive policy support, particularly in providing proper trading locations for street vendors.

In conclusion, the management of street vendors in Nabire City District does not only depend on the role of Satpol PP, but also requires inter-agency synergy and more integrated and sustainable local government policies.

Keywords: Satpol PP, Street Vendors, Enforcement, Effectiveness, Regional Regulations